Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak

The Role of the Asahan Regency P2KBP3 Service in Providing Legal Protection to Women and Children

Ari Dermawan*

Prodi Manajemen Informatika, STMIK Royal Kisaran, Indonesia

*Corresponding Email: aridermawan451@gmail.com

Diterima: Maret 2019; Disetujui: April 2019; Dipublish: Mei 2018

Abstrak

Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan berperan andil dalam memberikan pembangunan karakter terhadap perempuan dan anak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas pengaturan hukum mengenai pemberian perlindungan terhadap anak dan perempuan di Indonesia dan hak korban dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang serta bentuk kebijakan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan cara menganalisa data primer dan data sekunder dengan meneliti langsung ke lapangan serta baik dari bahan pustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan telah diatur berbagai regulasi perundang-undangan yang telah ada. Memberikan perlindungan dan menghargai perempuan dan anak melalui pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) kabupaten asahan. Penanganan yang diberikan P2TP2A Kabupaten Asahan adalah pelayanan komprehensif (multi aspek), holistik (secara menyeluruh, terpadu) dan layanan terpadu yang terkoordinasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Asahan

Abstract

The service of population control, family planning, women's empowerment and child protection in Asahan district play a role in providing of character development for women and children. The purpose of this study is to discuss legal arrangements regarding the protection of children and women in Indonesia and the rights of victims in legal protection against women victims from a woman trafficking and forms of service policy for population control, family planning, women's empowerment and child protection in Asahan district. The research method used is empirical legal research by analyzing primary data and secondary data by examining directly into the field as well as from library materials. Based on the results of this study, legal arrangements regarding the protection of children and women have been regulated by various existing laws and regulations. Providing protection and form of appreciate for the women and children through an integrated service center for women and children empowerment (P2TP2A) asahan district. Handling provided by Asahan Regency P2TP2A is a comprehensive (multi-aspect), holistic (comprehensive, integrated) and coordinated integrated service.

Keywords: Law Protection, woman and children, Asahan District

How to Cite: Dermawan, A. (2019). Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak. *Doktrina: Journal of Law*. 2 (1): 32-44

PENDAHULUAN

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016. Sebelumnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan bernama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asahan.

Adapun tugas dan fungsi utama dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak mempunyai fungsi: mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum, teknis, operasional bidang mobilisasi penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mengkoordinasikan penyiapan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kajian, ketentuan dan standart program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan pergerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungana anak, sesuai ketentuan dan

standar yang ditetapkan. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengaturan dan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pemberdayaan program Keluarga Berencana. Mengkoordinasikan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta kesehatan reproduksi remaja. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum. Pengelolaan Unit Pelaksanan Teknis. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu kewaktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (UNHCR, 2002) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam hal ini berperan andil cukup banyak dalam memberikan pembangunan karakter terhadap perempuan dan anak.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dibentuk yang namanya

pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) kabupaten Asahan. Ini merupakan pelayan terpadu yang bisa kita artikan pelayanan yang memberdayakan kembali secara utuh perempuan dan anak korban kekerasan melalui penanganan medis, psikososial dan hukum berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi, baik dari lingkungan pemerintah maupun masyarakat yang dibangun bersama secara terbuka dan terjangkau oleh masyarakat.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar, jumlah persentase kasus perdagangan orang di Indonesia tidak bisa disebutkan dengan pasti karena ini merupakan fenomena gunung es, jumlah dengan kenyataan di lapangan jauh dari yang diperkirakan. (Linda Amalia Sari Gumelar, <http://www.republika.co.id>).

Salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan orang di Indonesia adalah daerah Propinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan Propinsi Sumatera Utara dalam praktek perdagangan perempuan memiliki tiga fungsi strategis, yaitu sebagai daerah asal (*sending area*), daerah penampungan sementara (*transit*) dan juga sebagai daerah tujuan perdagangan manusia. Disisi lain berkaitan dengan posisi

geografis daerah Sumatera Utara yang strategis dan mempunyai aksesibilitas tinggi ke jalur perhubungan dalam dan luar negeri serta kondisi perkembangan daerah Sumatera Utara yang cukup baik di berbagai bidang. Sumatera Utara yang teridentifikasi daerahnya rawan perdagangan manusia sebanyak 8 (delapan) Kabupaten/Kota, antara lain : Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Tanjung Balai dan Simalungun. (Emy Suryana, 2009)

Bentuk dari perdagangan orang adalah berupa perekrutan, pengangkatan, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang dengan menggunakan cara-cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau berbagai bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan bayaran atau keuntungan lain guna mendapat persetujuan dari seseorang yang mempunyai kendali terhadap orang lain, untuk kepentingan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, sedikitnya eksploitasi prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik sejenisnya, perhambaan atau pengambilan organ-organ tubuh. Tindakan itu jelas bertentangan dengan

harkat dan martabat manusia, sehingga harus dihentikan. Pengoperasian perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Saat ini marak yang namanya perdagangan orang (*human trafficking*), tentunya ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengingat geografis Kabupaten Asahan yang sangat rawan terjadi perdagangan orang antar kota, provinsi maupun luar negeri.

Undang-Undang ini dibentuk karena adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Selain itu peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang

menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang yang mengatur mengenai perdagangan orang (*human trafficking*) sudah ada, tetapi pada prakteknya setiap tahun kasusnya terus meningkat. Ini membuktikan masih ada yang harus diperbaiki mengenai implementasi undang-undang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tentunya terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji dan dianalisis guna memecahkan masalah hukum yang berkenaan dengan peran dari dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan dalam memberikan bentuk perlindungan hukum. Sehingga dalam tulisan ini hanya membatasi pengaturan hukum mengenai pemberian perlindungan terhadap anak dan perempuan di Indonesia dan hak korban dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang serta bentuk kebijakan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan peneletian dilakukan di Kabupaten Asahan sesuai dengan judul penelitian ini, yang bertepatan di Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan (P2TP2A). Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan tempat objek yang diteliti pada (P2TP2A). Teknik pengumpul data terbagi menjadi dua yakni untuk data primer dengan langsung mengambil data kepada P2TP2A Kabupaten Asahan. Metode pengumpulan data melalui wawancara langsung yang dilakukan secara mendalam kepada sumber data. Adapun untuk data primer dan sekunder dari telaah berbagai literatur yang relevan dengan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui, studi kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, internet dan data-data yang diperoleh relevan kaitannya dengan penelitian.

Analisis data terhadap yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti

kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Setelah pengumpulan data dilakukan, baik dengan studi kepustakaan maupun studi lapangan dan wawancara, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yaitu berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan cara metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Pemberian Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan di Indonesia

Perdagangan orang terhadap perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mana status manusia secara individual, sebagai pengemban

kodrat kemanusiaan, namun menurut Sudikno Mertokusumo, setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi yang tidak terpisahkan yaitu hak dan kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, demikian juga tidak ada kewajiban tanpa hak. (Sudikno Mertokusumo, 1999)

Korban perdagangan orang diperlakukan sebagai komoditas yang diperjual-belikan, dikirim serta dijual; kembali. Fenomena yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya yang tetap hanyalah kondisi eksploitasi yang ditempatkannya terhadap manusia. Sebelumnya di diasosiasikan dengan prostitusi, namun kenyataannya mencakup banyak bentuk kerja paksa lain dan perbudak berkedok pernikahan. (Rahyanan, Salma Safitri, 2001)

Sejumlah undang-undang yang ada mengkriminalisasikan banyak tindakan yang diperbuat oleh pelaku perdagangan terhadap korban mereka. Bagian ini memetakan pasal-pasal hukum nasional yang dapat diterapkan terhadap perdagangan dan tindak pidana lain yang terkait dan dapat dipergunakan untuk, yaitu:

1. Menyusun pedoman bagi mereka yang ingin mengambil tindakan hukum

terhadap kasus perdagangan manusia dengan menggunakan Undang-Undang yang sudah ada.

2. Membuat rekomendasi untuk reformasi hukum nasional, terutama KUHP agar sejalan dengan instrumen-instrumen internasional yang berlaku ada termasuk konvensi-konvensi PBB yang ditandatangani oleh negara Indonesia. (Endang Sulistyaningsih, 1997)

Defenisi perdagangan Orang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan bahwa bentuk-bentuk perdagangan orang berupa perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi, menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah meratifikasi peraturan-peraturan atau Konvensi Internasional juga mengaturnya dalam hukum dasar

negara yaitu UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), dan mengatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan beberapa peraturan hukum seperti : Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jika korban adalah anak perempuan), Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Keimigrasian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak (jika korban adalah anak perempuan).

Hak Korban dalam Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perempuan korban perdagangan orang yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-undanga kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, setelah pelaku kejahatan telah

dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban tidak diperdulikan. Padahal keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan yang akibatnya dapat dirasakan seumur hidup. Penyelesaian perkara pidana seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”. (Andi Hamzah, 1986)

Bentuk atau model perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, untuk lebih mendalami bentuk perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, maka terdapat beberapa bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut :

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku. Restitusi ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan,

penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007).

Menurut Gelaway, (Farhana, 2012) yang merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu :

- a. Meringankan penderitaan,
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan,
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana,
- d. Mempermudah proses peradilan,
- e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam. (Chaeruddin dan Syarif Fadillah, 2004)

Inti tujuan dari kewajiban ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajiban sebagai manusia. Untuk itu diperlukan ataurabn dalam peraturan perundang-undangan yang tegas, sederhana, dan mudah dimengerti, sehingga dapat dihindari adanya diskriminasi dalam penerapan dari penegakkan hukum

ataupun intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang akan lebih memburuk posisi korban dalam penderitaan berkepanjangan. Pada tahap ini korban akan menderita kerugian sebagai korban kejahatan dan sebagai korban struktural. (Arif Gosita, 1987)

Pengertian restitusi menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

2. Layanan Konseling dan Pelayanan atau Bantuan Medis

Perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan manusia dapat bersifat fisik maupun psikis. Akibat yang bersifat psikis lebih lama untuk memulihkan dari pada akibat yang bersifat fisik. Pengaruh akibat tindak pidana perdagangan manusia dapat berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Untuk sebagian korban pengaruh akibat itu tidak sampai mencapai situasi yang stabil dimana ingatan akan kejadian dapat diterima dengan satu cara atau cara lain.

3. Bantuan Hukum

Korban tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang hendaknya diberikan bantuan hukum. Ketika korban memutuskan untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum, maka negara wajib memfasilitasinya, negara dalam hal ini mewakili korban untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.

4. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan informasi kepada korban atau keluarga melalui kontak *person* atau *web sites* di beberapa kantor Kepolisian, baik yang bersifat kebijakan maupun operasional.

Perlindungan Korban dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain sebagai berikut :

- 1) Hak kerahasiaan identitas korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan keluarganya sampai derajat kedua (Pasal 44).
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya (Pasal 47).

- 3) Hak mendapatkan restitusi (Pasal 48).
- 4) Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51).
- 5) Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara (Pasal 54).

Secara umum dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dan perempuan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada tau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar dari daerah asalnya atau ke luar negeri dengan risiko yang tidak sedikit.

b. Faktor Pendidikan

Korban tindak pidana perdagangan orang pada umumnya memiliki tingkat pendidikan rendah. Di antaranya berpendidikan SD dan SMP dan selebihnya berpendidikan SL TA. Sementara untuk mereka yang berpendidikan tinggi ketika menjadi

korban perdagangan orang (trafficking) biasanya karena penipuan.

c. Faktor Ekologis

Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar yaitu 238 juta berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010 dan secara geografis. Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 33 provinsi. Letak Indonesia sangat strategis sebagai negara asal maupun transit dalam perdagangan orang.

d. Ketidakadaan Gender

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak dirumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga dan mengasuh anak. Selain peran perempuan tersebut, perempuan juga mempunyai peran ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan, yaitu kesemuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan, serta tidak atau kurang

memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki.

e. Faktor Penegakan Hukum

Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksakan masyarakat untuk taat kepada hukum. Penegakan hukum tidak terjadi pada masyarakat karena ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor penegakan hukum adalah faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Bentuk Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Asahan yang bertujuan memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban

kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/pemberdayaan, dan mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender diberbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.

Adapun sasaran yang dilakukan oleh P2TP2A kabupaten asahan pada dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Asahan adalah perempuan dan anak korban kekerasan, masyarakat, pengambil kebijakan/pemerintah, serta lembaga pemberi layanan(organisasi maupun LSM).

Pelayanan terpadu yang diberikan dengan maksud Pelayanan yang memberdayakan kembali secara utuh perempuan dan anak korban kekerasan melalui penanganan medis, psikososial dan hukum berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi, baik dari lingkungan pemerintah maupun masyarakat yang dibangun bersama secara terbuka dan terjangkau oleh masyarakat.

Penanganan yang diberikan dan dibangun P2TP2A Kabupaten Asahan pada dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Komprehensif (multi aspek)
2. Holistik (secara menyeluruh, terpadu)
3. Seseegera mungkin (dilakukan secara koordinasi multi sektoral)
4. Layanan terpadu yang terkoordinasi (mudah diakses & Selalu siap dan terjaga kerahasiaannya)

P2TP2A Kabupaten Asahan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan selalu membangun kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu:

- a. Mempelajari gugus tugas sesuai amanat peraturan perundang-undangan melalui rapat koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait.
- b. Pastikan semua penanggung jawab pelayanan yang dilibatkan sesuai dengan SPM yang ada.
- c. Membuat sistem rujukan, dan
- d. Melakukan evaluasi secara rutin.

Standar pelayanan P2TP2A kabupaten asahan pada dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan,

dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No.	Permen KPP dan PA No. 01/2009	Permen KPP dan PA No. 01/2010
1.	Penanganan pengaduan/ identifikasi	Penanganan pengaduan
2.	Rehabilitasi kesehatan	Pelayanan kesehatan
3.	Rehabilitasi sosial	Rehabilitasi sosial
4.	Bantuan hukum	Penegakan dan bantuan hukum
5.	Pemulangan	Pemulangan dan reintegrasi sosial
6.	Reintegrasi sosial	

Kesepakatan dalam pembagian peran P2TP2A kabupaten asahan pada dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan, dibuat dalam bentuk tabel di bawah ini:

NO	PELAYANAN	PROFESI	LEMBAGA
1	Medik	Dokter (umum dan spesialis), perawat, bidan	Rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan
2	Hukum	Polisi, jaksa, hakim pengacara	LBH, Unit PPA, Polres, Polsek, Pengadilan, Kejaksaan
3	Psikososial	Psikolog, konselor, pekerja sosial, pengelola shelter, rohaniawan, tokoh adat, pendamping	P2TP2A, LSM, WCC, shelter / rumah aman, gereja / pesantren, Dinas Sosial.
4	Pemberdayaan	Pendamping, psikolog, pelatih (pelatihan ekonomi produktif dll)	Dinas Sosial, LSM, Dinas UKM, Dinas Tenaga Kerja

Strategi yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Asahan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, yaitu :

- 1) Kerjasama dg instansi terkait, sesuai SPM : Dinas Kesehatan (medis), Kepolisian (layanan hukum), Dinas Sosial (rumah aman, pemberdayaan).

2) Kerjasama dengan organisasi masyarakat yg punya jaringan luas hingga akar rumput.

3) Kerjasama dgn tokoh agama, tokoh adat/masyarakat.

4) Membuat komitmen yang diperkuat dgn MoU, SK dan Perda.

5) Koordinasi rutin dalam bentuk rapat evaluasi, dialog dan diskusi.

Mekanisme pengaduan kasus di P2TP2A Kabupaten Asahan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, yaitu:

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat ditarik simpulan bahwa Perlindungan terhadap perempuan korban perdagangan orang masih kurang maksimal, terbukti dari beberapa kasus tidak adanya perlindungan terhadap korban hanya sebatas pada pelakunya saja dipidana. Penyebab terjadinya perempuan

korban tindak pidana perdagangan orang adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor ekologis, faktor ketidakadaan gender, dan faktor penegakkan hukum. Penanganan yang diberikan dan dibangun P2TP2A kabupaten asahan pada dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan adalah pelayanan komprehensif (multi aspek), holistik (secara menyeluruh, terpadu), Sesegera mungkin (dilakukan secara koordinasi multi sektoral), layanan terpadu yang terkoordinasi (mudah diakses dan selalu siap dan terjaga kerahasiaannya)

- Salma Safitri, R, (2001), *Makalah Diskusi tentang Trafficking*, Jakarta, ACILS-Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- Sulistyaningsih, E, (1997), *Pelacuran di Indonesia, sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- UNHCR, (2002), *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum*, Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, Polri Jakarta
- Linda Amalia Sari Gumelar, *Perdagangan Manusia di Indonesia*, <http://www.republika.co.id>, diakses tanggal 27 Nopember 2018.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, G, (1987), *Viktimologi dan KUHP*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Chaeruddin dan Syarif Fadillah, (2004), *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Grahadika Press.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Farhana, (2012), *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hamzah, A, (1986), *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Binacipta.
- Mertokusumo, S, (1999), *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Munthe, R, *Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. (7) No. (2), Desember 2015.
- Suryana, E, (2009), *Implementas Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Trafking Perempuan dan Anak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.